



PERAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM MONITORING MEDIA SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN CITRA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Harji Sehatdo Nauli Harahap¹, Adjie Iqthiar Kusniadi², Hasan Sazali²

Harji Sehatdo Nauli Harahap¹, Adjie Iqthiar Kusniadi², Hasan Sazali³

Program Studi Ilmu Kounikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan monitoring media sebagai upaya pengelolaan citra pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring media dilakukan secara rutin dan sistematis terhadap media cetak, media online, dan media sosial untuk mengetahui dinamika opini publik serta mengevaluasi efektivitas komunikasi pemerintah. Monitoring media berperan penting dalam mendeteksi isu strategis, mencegah potensi krisis komunikasi, dan mendukung perumusan strategi komunikasi publik. Meskipun dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya dan tingginya volume informasi digital, monitoring media tetap menjadi instrumen strategis dalam menjaga citra pemerintah dan memperkuat kepercayaan publik.

Kata Kunci: komunikasi public; monitoring media; citra pemerintah

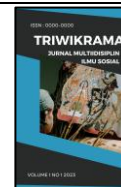
A B S T R A C T

This study aims to analyze the role of the Information and Public Communication Division (IKP) of the Department of Communication and Informatics of North Sumatra Province in implementing media monitoring as an effort to manage the government's public image. This research employs a qualitative method with a case study approach through in-depth interviews, observation, and documentation techniques. The results indicate that media monitoring is conducted routinely and systematically across print media, online media, and social media to understand the dynamics of public opinion and evaluate the effectiveness of government communication. Media monitoring plays an important role in identifying strategic issues, preventing potential communication crises, and supporting the formulation of public communication strategies. Despite challenges such as limited resources and the high volume of digital information, media monitoring remains a strategic instrument in maintaining the government's image and strengthening public trust.

Keywords: Collaborative Governance; Institutional Design; Foreign Exchange Village Program

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhruufi@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap penyebaran informasi publik secara signifikan. Media massa konvensional kini berjalan berdampingan dengan media digital dan media sosial yang memiliki karakter cepat, luas, dan interaktif (Kurniati et al., 2020). Perubahan ini menuntut instansi pemerintah untuk mampu mengelola arus informasi secara strategis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik serta menjaga kredibilitas lembaga pemerintah (Papani et al., 2025).

Dalam konteks pemerintahan, komunikasi publik merupakan instrumen utama dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) berperan sebagai pengelola informasi resmi pemerintah, sekaligus penjaga konsistensi pesan kebijakan yang disampaikan kepada publik (Gunawan et al., 2020). Keberhasilan komunikasi publik sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Kriyantono & Brawijaya, 2019).

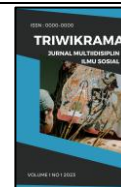
Salah satu aktivitas strategis dalam komunikasi publik pemerintah adalah monitoring media. Media monitoring didefinisikan sebagai proses pemantauan, pencatatan, dan analisis isi pemberitaan media cetak, media online, dan media sosial terkait isu pemerintahan (Dewi et al., 2022). Kegiatan ini berfungsi untuk mengetahui kecenderungan opini publik sekaligus sebagai alat kontrol terhadap penyebaran informasi yang berpotensi merugikan citra pemerintah (Mancanagara & Risdayani, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa monitoring media menjadi fondasi penting dalam praktik humas pemerintah. Melalui analisis nada pemberitaan (tone), frekuensi isu, serta framing media, humas dapat mengukur persepsi publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Hasil monitoring tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi lanjutan (Rizqiyah & Kriyantono, 2021).

Di era digital, tantangan monitoring media semakin kompleks akibat tingginya volume informasi dan maraknya penyebaran hoaks. Media sosial memungkinkan masyarakat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi, sehingga pemerintah dituntut untuk melakukan monitoring secara real time (Zaxrie et al., 2024). Ketidaksiapan dalam merespons isu digital dapat memicu krisis komunikasi yang berdampak pada menurunnya citra institusi pemerintah (Setiawan et al., 2019).

Penelitian lain menegaskan bahwa efektivitas media monitoring sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia humas pemerintah. Kompetensi analisis media, pemahaman jurnalistik, dan kemampuan membaca dinamika sosial menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan citra (Hastrida, 2021). Media monitoring tidak lagi bersifat administratif, melainkan bagian dari manajemen strategis komunikasi publik (Fill & Fill, 2018).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menjalankan fungsi monitoring media sebagai bagian dari tugas kehumasan pemerintah daerah. Bidang ini memantau pemberitaan terkait kebijakan dan aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di berbagai platform media, serta melakukan dokumentasi dan analisis isu sebagai bahan evaluasi komunikasi publik.



Sejumlah studi kasus humas pemerintah daerah menunjukkan bahwa monitoring media yang dilakukan secara sistematis mampu meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan mencegah krisis citra. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan waktu, SDM, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring sebagai dasar pengambilan keputusan komunikasi (Yusuf et al., n.d.).

Selain sebagai alat pemantauan, media monitoring juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah. Informasi yang diperoleh dari media dapat menjadi umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan publik dan kualitas pelayanan informasi. Dengan demikian, media monitoring berkontribusi dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan (Maunty Isnaeny et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji Peran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam Monitoring Media sebagai Upaya Pengelolaan Citra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur komunikasi publik dan humas pemerintah, serta menjadi referensi praktis bagi instansi pemerintah dalam mengoptimalkan media monitoring sebagai strategi pengelolaan citra di era digital.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Komunikasi Publik dalam Pemerintahan

Komunikasi publik merupakan salah satu fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Komunikasi publik pemerintah bertujuan untuk menyampaikan informasi kebijakan, program, dan aktivitas pemerintah kepada masyarakat secara terbuka, akurat, dan bertanggung jawab. Melalui komunikasi publik yang efektif, pemerintah dapat membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan (Nanda Karunia Isa & Wijaya, n.d.).

Dalam konteks pemerintahan, komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi satu arah, tetapi juga sebagai media dialog antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk mampu mendengarkan aspirasi, kritik, serta opini publik yang berkembang di ruang publik. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi dua arah simetris yang menempatkan pemerintah dan masyarakat sebagai subjek komunikasi yang setara (Grunig & Grunig, 1992).

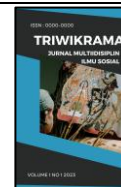
Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang komunikasi publik melalui media online dan media sosial. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dalam mengelola komunikasi publik agar informasi resmi pemerintah tidak kalah oleh arus informasi yang tidak terverifikasi. Oleh karena itu, peran humas pemerintah menjadi semakin penting dalam mengelola pesan dan persepsi publik (Maunty Isnaeny et al., 2025).

2. Humas Pemerintah dan Peran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Humas pemerintah merupakan bagian integral dari sistem komunikasi pemerintahan yang berfungsi membangun dan memelihara citra positif lembaga publik. Humas pemerintah bertugas mengelola hubungan dengan media, menyusun strategi komunikasi, serta memastikan informasi publik tersampaikan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nanda Karunia Isa & Wijaya, n.d.).

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis sebagai pelaksana fungsi kehumasan pemerintah daerah. Bidang ini bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik, diseminasi kebijakan, serta pengawasan pemberitaan media terkait aktivitas pemerintah. Peran tersebut menunjukkan bahwa IKP tidak hanya berfungsi sebagai unit teknis, tetapi juga sebagai pengelola komunikasi strategis pemerintah daerah (Yusuf et al., n.d.).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas humas pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam melakukan riset komunikasi, termasuk monitoring media. Tanpa riset dan evaluasi media yang memadai, strategi komunikasi pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang responsif terhadap dinamika opini publik (Nurhanifah et al., 2024).

3. Media Monitoring sebagai Instrumen Komunikasi Publik

Media monitoring merupakan proses sistematis untuk memantau, mencatat, dan menganalisis isi pemberitaan media cetak, media online, dan media sosial yang berkaitan dengan suatu organisasi atau institusi. Dalam konteks humas pemerintah, media monitoring digunakan untuk mengetahui kecenderungan pemberitaan, persepsi publik, serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat (Yusuf et al., n.d.).

Monitoring media memiliki fungsi sebagai alat evaluasi komunikasi publik pemerintah. Melalui monitoring media, humas dapat menilai sejauh mana pesan kebijakan pemerintah diterima dan dipahami oleh publik. Selain itu, monitoring media juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi krisis komunikasi yang dapat merugikan citra pemerintah (Fill & Fill, 2018).

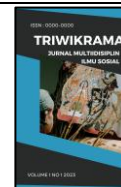
Di era digital, media monitoring tidak hanya terbatas pada media konvensional, tetapi juga mencakup media sosial yang memiliki karakter dinamis dan cepat. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang utama pembentukan opini publik, sehingga monitoring media sosial menjadi kebutuhan penting bagi humas pemerintah dalam mengelola komunikasi publik secara efektif (Gunawan et al., 2020).

1. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, peran, serta praktik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dalam melakukan monitoring media sebagai upaya pengelolaan citra pemerintah (M.Si et al., 2020). Studi kasus digunakan untuk menggali fenomena secara kontekstual pada satu objek penelitian yang spesifik, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik komunikasi publik yang dijalankan (Agustini et al., 2020).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang terlibat dalam pelaksanaan monitoring media, serta melalui observasi terhadap aktivitas monitoring media yang dilakukan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen resmi



instansi, seperti laporan monitoring media, arsip pemberitaan, regulasi terkait komunikasi publik, serta literatur berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik komunikasi publik, humas pemerintah, monitoring media, dan pengelolaan citra pemerintah.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada pihak Bidang IKP Diskominfo Provinsi Sumatera Utara yang terlibat langsung dalam kegiatan monitoring media untuk memperoleh informasi terkait mekanisme, tujuan, serta pemanfaatan hasil monitoring. Observasi dilakukan secara partisipatif berdasarkan pengalaman praktik kerja lapangan guna memahami alur kerja dan aktivitas monitoring media secara langsung. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui arsip monitoring berita, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya (Sugiyono, 2020).

Analisi Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara sistematis dan berkelanjutan hingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap peran Bidang IKP dalam monitoring media. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles & Huberman, 2014).

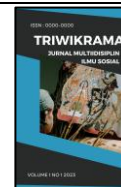
2. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Program Desa Devisa

Program desa devisa merupakan salah satu program inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi local. Program ini dibawa oleh Pemerintah Provinsi bersama dengan Lembaga Pengelola Ekspor Indonesia (LPEI) dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi desa dan meningkatkan pendapatan Negara melalui ekspor. Desa Sidomulyo terpilih menjadi Desa Devisa karena berhasilnya swasta local desa melakukan ekspor kopi, yang menunjukkan adanya potensi besar di desa ini. Pemerintah Desa melihat adanya potensi ini dan ingin memanfaatkannya secara optimal. Oleh karena itu, untuk membantu pemanfaatan potensi ini, Pemerintah Desa kemudian menjadikan program desa devisa sebagai bagian dari program Pemerintah Desa Sidomulyo. Kegiatan utama yang ada dalam program Desa Devisa adalah ekspor. Desa Sidomulyo memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, namun potensi yang sudah siap untuk diekspor masih terbatas pada kopi. Pernyataan ini disampaikan oleh Mas Dhoris selaku manager dari ketakasi.

“Kebetulan memang tahun awal awal itu kan memang fokusnya kopi karena secara administrasi secara kontinuitas itu juga yang sudah sangat siap jadi masih fokus ke kopi sebenarnya potensinya masih banyak yang masih bisa ekspor.” (Wawancara 15 Februari 2025)



Adanya program Desa Devisa membawa perubahan besar bagi Desa Sidomulyo, khususnya kepada para petani lokal. Mereka tidak perlu lagi mencemaskan tentang penjualan kopi, karena sudah dapat dipastikan bahwa Ketakasi membutuhkan banyak pasokan kopi untuk kegiatan ekspor. Hal ini memberikan kepastian dan keamanan bagi petani lokal dalam menjual hasil panen mereka, sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses penanaman dan pemeliharaan kopi. Namun, selama dalam pelaksanaannya, program ini juga masih menemui beberapa kendala dan tantangan. Tantangan ini disampaikan oleh Pak Lutfi selaku asisten Kepala Desa.

“sebetulnya yang menjadi hambatan itu adalah untuk meyakinkan petani lokal. Karena petani lokal di desa Sidomulyo ini, rata-rata mereka itu ketika menjual kopi, uangnya harus ada. Artinya ketika barang itu keluar sekarang, uangnya juga harus sekarang. Sedangkan, metode dan skema ekspor itu tidak seperti itu. Dan secara teknis kita memang belum ada badan seperti apa yang diamanahkan di dalam perdes” (Wawancara 11 Februari 2025)

Program desa devisa ini secara tidak langsung menguntungkan banyak pihak internal yang ada di Desa Sidomulyo. Pemerintah diuntungkan dengan mendapatkan gelar sebagai desa penyumbang devisa. Swasta lokal atau pelaku usaha lokal juga sangat diuntungkan, apalagi setelah disahkannya desa devisa di Desa Sidomulyo nama ketakasi semakin dikenal oleh banyak kalangan. Pihak yang paling diuntungkan adalah petani, mereka banyak mendapatkan wawasan dan juga peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Aktor Dalam Program Desa Devisa

Peran pemerintah yang dimaksud dalam program desa devisa adalah peran Pemerintah Desa Sidomulyo. Pemerintah Desa Sidomulyo membantu memfasilitasi dan mendukung kegiatan ekspor kopi yang dilakukan oleh swasta lokal yaitu ketakasi. Selain itu, pemerintah desa juga membantu menjembatani para aktor yang terlibat didalam kegiatan ekspor. Salah satunya dengan mengadakan FGD (*Forum Group Discussion*) yang diahadiri oleh para pemangku kepentingan sehingga terbentuknya kesepakatan dalam bentuk Peraturan Desa Devisa, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kamil selaku Kepala Desa Sidomulyo.

“pemerintah desa itu hanya fasilitator untuk menemukan buyer dan juga untuk menemukan kesepakatan”(Wawancara 11 Februari 2025)

Ketakasi merupakan swasta lokal desa yang memainkan peran penting dalam kegiatan ekspor kopi. Peran Ketakasi dalam program ini meliputi beberapa aspek. Salah satunya, mereka berperan sebagai pelaksana ekspor kopi, yaitu mereka menjadi wadah pengumpulan serta pembeli kopi hasil panen masyarakat. Setelah itu, kopi tersebut diolah menjadi bubuk kopi berkualitas yang siap diekspor. Hal ini tentunya sangat membantu memudahkan petani dalam penjualan kopi hasil panen, sebagaimana disampaikan oleh Pak Sunari anggota kelompok tani sidomulyo satu.

“sekarang sudah enak, jadi ketika kita menanam biji kopi sudah nggak bingung lagi, karena sudah jelas akan terjual dan jelas arahnya kemana, Alhamdulillah sudah sangat mencukupi sekarang.” (Wawancara 15 Februari 2025)

Dalam menjalankan kegiatan ekspor, Ketakasi menjalin hubungan kerja sama dengan banyak lembaga, khususnya lembaga ekspor, untuk memperluas jaringan pasar. Mereka juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti universitas, untuk melakukan edukasi kepada petani terkait pemeliharaan kopi yang baik. Dengan demikian, Ketakasi tidak hanya berperan sebagai pelaksana ekspor, tetapi juga sebagai pendukung pengembangan kemampuan petani lokal. Petani kopi memainkan peran paling sentral karena mereka merupakan pemasok kopi untuk bahan ekspor. Hasil panen petani kopi menjadi komponen utama dalam kegiatan ekspor, sehingga mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung kegiatan ini. Kelompok tani merupakan perkumpulan yang berada di lingkungan dusun yang terdiri dari masyarakat bermata pencaharian petani, sebagaimana disampaikan oleh Pak Lutfi.

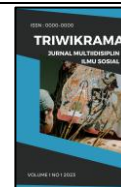
“katakanlah disini yang paling sentral adalah petani. Jadi, kalau petani itu tidak mendukung dari aktivitas ekspor ini, kita juga percuma, kalau tidak ada barang juga untuk kita tawarkan.”(Wawancara 11 Februari 2025)

Program desa devisa di Desa Sidomulyo tidak hanya bergantung pada upaya internal, tetapi juga didukung oleh berbagai pihak eksternal. Bantuan finansial dari kerja sama Ketakasi dengan perbankan, seperti Bank Jatim dan Bank Syariah Mandiri yang memungkinkan program ini berjalan secara efektif. Kerja sama dengan perusahaan pengelola ekspor juga sangat penting bagi keberhasilan program desa devisa. Ketakasi telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan ekspor, seperti PT Bright Java, PT Indocom Citra Persada. Serta PT Olam Indonesia. Berikut adalah tabel aktor yang terlibat beserta perannya :

No.	Aktor	Lembaga	Peran
1.	Pemerintah	Pemerintah Desa	Fasilitator ekspor dan penghubung antar aktor yang terlibat didalamnya.
2.	Swasta	Ketakasi	Pelaksana kegiatan ekspor dan penghubung antara petani dengan pemerintah.
3.	Masyarakat	Kelompok Tani	Penyedia bahan baku ekspor.
4.	Eksternal	Perbankan : 1. Bank Jatim 2. Bank Syariah Mandiri	Penyedia bantuan finansial atau permodalan
		Bank Indonesia	Penguatan kapasitas petani lokal, dukungan non finansial serta pemasaran.
		Dinas Koperasi Jawa Timur	Bantuan pemasaran (mencari peluang pasar dan konsumen)
		Dinas Pertanian dan Dinas TPHP (Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan)	Penyalur bantuan subsidi pupuk kepada kelompok tani.
		Perguruan Tinggi	Penguatan kapasitas sumber daya.
		Perusahaan Pengelola Ekspor : 1. PT Indocom Citra Persada (2007-2014) 2. PT Olam Indonesia Company (2023-sekarang)	Pihak ketiga dalam pemasaran produk Ketakasi ke pasar/ konsumen Internasional. Pihak yang berhubungan langsung dengan pasar Internasional.

Sumber : peneliti

Struktur



Program desa devisa di Desa Sidomulyo memiliki keunikan dalam struktur kelembagannya. Struktur kelembagaan yang dimaksud adalah adanya komunitas-komunitas baik formal dan non formal didalamnya. Salah satu contoh komunitas yang cukup aktif dikalangan masyarakat adalah kelompok tani. Keberadaan komunitas-komunitas ini didukung oleh pernyataan Pak Lutfi selaku ketua karangtaruna di Desa Sidomulyo.

“Sepertinya ada banyak cuman saya tidak mengetahui terlalu jelas karena berbicara pertanian itu kan tidak hanya berpaku pada ikatan formal adanya kelompok tani itu kan hanya sebatas memperkuat adanya petani ketika berbicara tentang proses pembelajaran atau proses penyuplaian pupuk dan lain sebagainya pasti mereka memiliki jaringan masing-masing ada yang di dalam Sidomulyo ada yang di luar Sidomulyo atau bahkan bisa lebih tinggi daripada petani-petani yang ada di sini” (Wawancara 11 Februari 2025)

Kelompok tani berada dibawah naungan Dinas Pertanian yang sekarang berubah menjadi Dinas TPHP. Kelompok tani di Desa Sidomulyo menjadi perkumpulan petani dalam lingkup wilayah dusun. Jadi, ada 6 kelompok tani di Desa Sidomulyo sesuai jumlah dusun yang ada. Perkumpulan kelompok tani membawa banyak keuntungan bagi anggota yang tergabung didalamnya. Keuntungan tersebut disampaikan oleh Mas Dhori.

“Kalau keuntungan paling tidak ilmu lah Itu sudah pasti terus habis itu lebih diperhatikan pemerintah secara langsung karena bantuan-bantuan Pemerintah itu langsung turun kepada kelompok tani bukan ke petani secara umum jadi yang ngga bergabung di dalam kelompok tani yang nggak dapat bantuan seperti bantuan pupuk karena memang dari pemerintah itu ada beberapa bantuan seperti bibit kopi, bibit jagung, benih padi itu yang hanya bisa akses hanya anggota kelompok tani” (Wawancara 15 Februari 2025)

Struktur yang unik juga terjadi di Ketakasi, Ketakasi sebagai pengelola ekspor di Desa Sidomulyo memiliki dua jenis anggota yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa, sebagaimana penyampaian Pak Joko.

“sayaa kan sebagai anggota luar biasa, kalau anggota biasa itu yg ada dilingkup wilayah desa, jadi Sidomulyo itu punya perjalanan panjang” (Wawancara 18 Februari 2025)

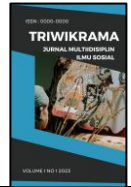
Hal ini menunjukkan bahwa Ketakasi memiliki visi yang luas dan terbuka dalam mengembangkan kelembagannya, sehingga memungkinkan kerja sama yang efektif dengan berbagai pihak. Dengan demikian, Ketakasi dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari anggota luar untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagannya, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Kegiatan Ekspor

Secara umum, ekspor dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekspor mandiri dan ekspor bersama. Ekspor mandiri adalah kegiatan ekspor yang dilakukan secara langsung oleh produsen atau petani. Sedangkan ekspor bersama merupakan ekspor melalui pihak ketiga sebagaimana disampaikan oleh Mas Dhori selaku manager Ketakasi.

“Sebenarnya ekspor itu dibagi beberapa ada ekspor bersama dan ada ekspor mandiri kalau ekspor bersama itu masih melibatkan pihak eksportir pihak kedua lah Kalau ekspor bersama seperti apa yang dilakukan bank Indonesia kepada kita kasih itu ya setiap tahun itu cuman sifatnya itu ekspor bersama.” (Wawancara 15 Februari 2025)

Ketakasi melakukan ekspor bersama dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Perusahaan yang pertama bekerja sama dengan Ketakasi adalah PT Indocom Citra Persada. Kerja sama ini dilakukan jauh sebelum Desa Sidomulyo ditetapkan menjadi desa devisa pada tahun 2007. Kerja sama dengan PT Indocom Citra Persada telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Desa Sidomulyo. Hal ini disampaikan oleh Pak Joko, dosen Faperta UNEJ sekaligus badan pengawas di Ketakasi.



“kami masuk tahun 2008, jadi selama saya disana eksportinya adalah PT citra persada di sidoarjo, jadi kopi diambil oleh citra persada dalam bentuk olahan basah, mereka yang kirim, tidak pernah petani bersentuhan langsung dengan pihak ekspor. sehingga transaksi antara PT indocom/ citra persada tadi itu dengan koperasi, bukan dengan petani, petani tergantung dikoperasi, jadi secara kelembagaan kontraknya adalah indocom dengan koperasi”(Wawancara 18 Februari 2025)

Setelah itu, kerja sama dilanjutkan dengan PT Olam Indonesia Company, perusahaan pengelola ekspor dari Surabaya. Kerja sama ini sudah berjalan kurang lebih tiga tahun hingga saat ini. Namun, pelaksanaan ekspor masih mendapati beberapa kendala seperti persyaratan administrasi dan pencarian pasar ekspor. Hal ini yang membuat Ketakasi hingga saat ini belum bisa melakukan ekspor mandiri. Ekspor ini juga mengalami kendala dalam kesepakatan harga, karena ekspor juga terdapat proses bisnis didalamnya. Akan tetapi, keuntungan menjadi lebih besar jika terlaksana ekspor. Hal ini dikarenakan ekspor dapat memasarkan kopi petani dalam jumlah besar. Mas Dhori juga menyampaikan perbandingan harga tersebut.

“Sebenarnya karena mindset kita Kalau ekspor itu mahal sementara tujuan kita itu memang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum, Jadi kalau misalkan kita jual di lokal Rp20.000 Tapi kalau ketika Ekspor kita bisa menjual 25.000 itu kan bisa menjadi nilai tambah untuk petani, jadi termasuk kayak kita membangun industri terus barang jadi itu kan sebenarnya maksudnya untuk meningkatkan harga agar petani lebih sejahtera”(Wawancara 15 Februari 2025)

Pendapatan keuntungan ini juga diperkuat oleh penyampaian Pak Sunari selaku petani sekaligus anggota kelompok tani sidomulyo 1.

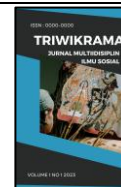
“alhamdulillah sekarang itu, anggapannya kalau kita kirim 3 riim aja sudah bisa dapet 1,3 M. jadi uang itu kayak mengalir, alhamdulillah pokonya alhamdulillah.”(Wawancara 15 Februari 2025)

Pola kolaborasi, kelembagaan, dan pengelolaan organisasi serta kerja sama di Ketakasi merupakan hal yang perlu dijadikan contoh bagi pemerintah desa lain. Hal ini terbukti sangat bisa dilakukan dan yang paling penting adalah untuk mengembangkan potens lokal desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Selain itu, kegiatan ekspor ini juga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan memperluas pasar ekspor Indonesia.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Monitoring Media oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara secara konsisten melaksanakan monitoring media sebagai bagian dari fungsi komunikasi publik pemerintah daerah. Monitoring dilakukan terhadap media cetak, media online, dan media sosial yang memuat pemberitaan maupun percakapan publik terkait kebijakan dan aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Aktivitas ini mencakup pengumpulan berita, klasifikasi isu, serta pencatatan kecenderungan isi dan nada pemberitaan.



Tabel 1. Pelaksanaan Monitoring Media oleh Bidang IKP Diskominfo Provinsi Sumatera Utara

Aspek Monitoring Media	Deskripsi Pelaksanaan
Jenis media yang dimonitor	Media cetak, media online, dan media sosial
Fokus monitoring	Pemberitaan dan isu publik terkait kebijakan dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Bentuk kegiatan	Pengumpulan berita, klasifikasi isu, analisis kecenderungan pemberitaan
Waktu pelaksanaan	Dilakukan secara rutin setiap hari kerja
Output monitoring	Laporan harian dan mingguan sebagai bahan evaluasi komunikasi
Tujuan utama	Mengetahui persepsi publik dan dinamika opini masyarakat

Pelaksanaan monitoring media dilakukan secara rutin dan terstruktur, dimulai dari pengumpulan data pemberitaan hingga penyusunan laporan harian dan mingguan. Laporan tersebut berfungsi sebagai bahan evaluasi internal dan rujukan bagi pimpinan dalam memahami dinamika opini publik. Praktik ini sejalan dengan konsep media monitoring sebagai bentuk riset komunikasi yang bertujuan untuk mengetahui respons publik terhadap pesan-pesan yang disampaikan pemerintah melalui media massa dan media digital.

Dalam perspektif komunikasi publik, kegiatan monitoring media yang dilakukan Bidang IKP menunjukkan pergeseran peran humas pemerintah dari sekadar penyampai informasi menjadi pengelola komunikasi strategis. Monitoring media memungkinkan pemerintah untuk tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan dan memahami suara publik yang tercermin dalam media. Hal ini memperkuat fungsi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam kajian humas pemerintahan modern.

Peran Monitoring Media dalam Pengelolaan Citra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa monitoring media berperan penting dalam upaya pengelolaan citra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Melalui analisis isi dan kecenderungan pemberitaan, Bidang IKP dapat mengidentifikasi bagaimana citra pemerintah dibentuk oleh media, baik dalam bentuk pemberitaan positif, netral, maupun negatif. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.

Tabel 2. Peran Monitoring Media dalam Pengelolaan Citra Pemerintah

Peran Monitoring Media	Bentuk Implementasi
Deteksi isu publik	Mengidentifikasi isu sensitif dan kritik masyarakat sejak dini
Evaluasi citra pemerintah	Menilai kecenderungan citra positif, netral, atau negatif di media
Dasar strategi komunikasi	Menjadi rujukan penyusunan klarifikasi dan penguatan narasi kebijakan
Pencegahan krisis komunikasi	Mengantisipasi potensi krisis citra melalui respons komunikasi yang tepat



Penguatan kepercayaan publik	Menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat
------------------------------	--

Monitoring media membantu pemerintah dalam mendeteksi isu-isu sensitif dan potensi krisis komunikasi sejak dini. Ketika ditemukan pemberitaan atau opini publik yang berpotensi merugikan citra pemerintah, Bidang IKP dapat memberikan rekomendasi komunikasi, seperti klarifikasi informasi atau penguatan narasi kebijakan melalui media resmi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pengelolaan citra pemerintah harus didasarkan pada data dan analisis media, bukan semata-mata intuisi.

Dalam konteks komunikasi publik, citra pemerintah tidak dibentuk melalui manipulasi informasi, melainkan melalui penyampaian informasi yang akurat, konsisten, dan transparan. Monitoring media menjadi sarana evaluasi untuk memastikan bahwa pesan pemerintah dipahami dengan benar oleh publik. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa media monitoring merupakan instrumen strategis humas pemerintah dalam membangun kepercayaan dan legitimasi publik (J-PR BSI, 2020; Jurnal Kajian Komunikasi, 2021).

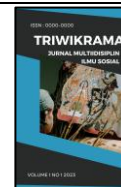
Tantangan dan Implikasi Monitoring Media bagi Komunikasi Publik Pemerintah

Hasil penelitian juga mengungkap adanya tantangan dalam pelaksanaan monitoring media di Bidang IKP Diskominfo Provinsi Sumatera Utara. Salah satu tantangan utama adalah tingginya volume informasi yang harus dipantau setiap hari, terutama dari media online dan media sosial. Kecepatan penyebaran informasi di ruang digital menuntut humas pemerintah untuk bekerja secara cepat dan cermat agar tidak tertinggal oleh dinamika isu publik.

Tabel 3. Tantangan Monitoring Media dan Implikasinya bagi Komunikasi Publik

No	Tantangan yang Dihadapi	Implikasi terhadap Komunikasi Publik
1	Tingginya volume informasi media	Membutuhkan ketelitian dan kecepatan analisis
2	Dinamika isu yang cepat berubah	Menuntut respons komunikasi yang adaptif
3	Keterbatasan sumber daya manusia	Analisis media belum dapat dilakukan secara mendalam
4	Banyaknya platform media digital	Monitoring harus dilakukan secara berkelanjutan
5	Waktu kerja yang terbatas	Perlunya prioritas isu strategis

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu kerja menjadi faktor yang memengaruhi kedalaman analisis media. Tidak semua pemberitaan dapat dianalisis secara mendalam, sehingga diperlukan prioritas terhadap isu-isu yang dinilai strategis atau berpotensi memengaruhi citra pemerintah. Tantangan ini juga ditemukan dalam berbagai penelitian humas pemerintah daerah lainnya, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi monitoring media.



Meskipun menghadapi tantangan tersebut, monitoring media tetap memiliki implikasi penting bagi peningkatan kualitas komunikasi publik pemerintah. Monitoring media dapat menjadi alat evaluasi kebijakan komunikasi dan sarana untuk memahami aspirasi masyarakat. Dengan memanfaatkan hasil monitoring secara optimal, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan. Temuan ini sejalan dengan prinsip good governance yang menempatkan komunikasi publik sebagai elemen kunci dalam hubungan pemerintah dan masyarakat.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

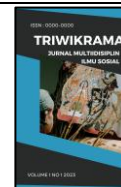
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam pelaksanaan monitoring media sebagai bagian dari komunikasi publik pemerintah daerah. Monitoring media dilakukan secara rutin dan sistematis terhadap media cetak, media online, dan media sosial, mulai dari pengumpulan hingga analisis pemberitaan. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami dinamika opini publik, mengevaluasi efektivitas penyampaian informasi, serta mendeteksi isu-isu yang berpotensi memengaruhi citra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Monitoring media yang dijalankan oleh Bidang IKP terbukti berkontribusi dalam upaya pengelolaan citra pemerintah melalui penyediaan data dan analisis yang menjadi dasar perumusan strategi komunikasi. Meskipun dihadapkan pada tantangan berupa tingginya volume informasi dan keterbatasan sumber daya, monitoring media tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas informasi dan kepercayaan publik. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan hasil monitoring secara optimal, kegiatan ini dapat semakin mendukung terwujudnya komunikasi publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada prinsip good governance

Saran

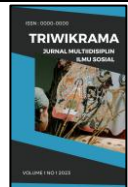
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring media melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal. Peningkatan kompetensi analisis media, khususnya terhadap media sosial dan isu digital yang berkembang cepat, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merespons opini publik secara lebih tepat dan strategis. Selain itu, hasil monitoring media sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perumusan kebijakan komunikasi publik dan penyusunan pesan pemerintah yang lebih terarah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan atau metode yang berbeda, seperti metode kuantitatif atau mixed methods, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh monitoring media terhadap citra pemerintah. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian pada instansi pemerintah lainnya atau membandingkan praktik monitoring media antar daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kajian komunikasi publik dan kehumasan pemerintah di Indonesia.



4. DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, A., Akbar, S., Lubis, A., & Maryati, I. (2020). *Metode penelitian kualitatif (Teori & panduan praktis analisis data kualitatif)* (Issue May 2024).
<https://www.bing.com/ck/a?!&p=c5537d061f0804013a87a922d43bf48c39927b05c706a36cd49b64541d2039caJmltdHM9MTcONTI4MDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=35d2f0ff-a3d3-6c14-14a2-e22ea7d36266&psq=teknik+analisis+data+penelitian+kualitatif+dengan+metode+wawancara&u=a1a>
- Dewi, M. S., Wahyuni, I. I., Studi, P., Komunikasi, I., & Telkom, U. (2022). *STRATEGI MEDIA MONITORING PADA PEMBERITAAN COVID-19 DI MEDIA DARING (Langkah Preventif Biro Humas Pemprov Jabar Dalam Mendeteksi Berita Hoax Mengenai Covid-19) MEDIA MONITORING STRATEGY ON ONLINE NEWS OF COVID-19 (Preventive Steps for the Bureau of Public Relations of the West Java Provincial Government in Detecting Hoax News Regarding Covid-19)*. V(1), 35-43.
- Fill, M., & Fill, T. (2018). *MEDIA MONITORING AS AN ELEMENT OF STRATEGIC*. 69-75.
<https://doi.org/10.2478/sc-2018-0025>
- Grunig, J., & Grunig, L. (1992). Models of public relations and communication. In *Excellence in public relations and communication management* (pp. 285-325).
- Gunawan, A. I., Anisa, R., Monitoring, M., & Cimahi, K. (2020). *KEGIATAN MEDIA MONITORING HUMAS*. 3(2), 122-131.
- Hastrida, A. (2021). *PROSES PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH : MANFAAT DAN RISIKO PROCESS OF GOVERNMENT SOCIAL MEDIA MANAGEMENT : BENEFIT AND RISK*.
- Kriyantono, R., & Brawijaya, U. (2019). *Research Strategies and Media Relations in Public Relations Practices*. 8(2), 178-190.
- Kurniati, K., Munir, M., Hamidah, L., & Rizky, A. S. (2020). Monitoring dan evaluasi humas pemerintah dalam penggunaan media sosial untuk memerangi hoaks. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 5(1), 78. <https://doi.org/10.24198/jmk.v5i1.27616>
- M.Si, A. P., Ustiawaty, J., Andriani, H., istiqomah, ria, Sukmana, D., Fardani, R., Auliya, N., & Utami, E. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Mancanagara, K., & Risdayani, F. (2024). *Identifying Golden Time in Responding to a Communication Crisis Through Media Intelligence Monitoring Tools*. 40(4), 431-449.
- Maunty Isnaeny, Ilya Hanifah Hakim, & Hilma Mutiara Winata. (2025). *ANALISIS MEDIA MONITORING: EVALUASI SENTIMEN PUBLIK TERHADAP KINERJA PRESIDEN PRABOWO-GIBRAN SELAMA 1 TAHUN*. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 5(1 SE-Articles), 195-217.
<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/3310>
- Nanda Karunia Isa, & Wijaya, L. S. (n.d.). Strategi Public Relations Dalam Membangun Citra Positif Pemerintah Kota Surakarta Melalui Media Relations. *Journal Media Public Relations*, 4(2 SE-Articles), 85-96. <https://doi.org/10.37090/jmp.v4i2.1765>
- Nurhanifah, Try Akhmal Hidayat, Sapriadi Rambe, Yoga Bali Prawira, & Siti Fatimah Hasibuan. (2024). Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif di Instagram Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(5 SE-Articles), 141-150. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v4i5.4696>
- Papani, Y., Komaruddin, K., & Setiawan, M. A. (2025). *PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI*, 16, 90-99. <https://doi.org/10.51903/bmc4rq50>



- Rizqiyah, R. N., & Kriyantono, R. (2021). *MANAJEMEN MEDIA RELATIONS DALAM MENINGKATKAN*. 6(1), 53-66.
- Setiawan, T., Kurniawati, J., Saputro, E., Fakultas, D., Komunikasi, I., Boyolali, U., Program, M., Ilmu, M., Fakultas, M., Komunikasi, I., & Boyolali, U. (2019). *Komunikasi krisis di era digital*.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Yusuf, A. Y., Rahmawati, Y., & Praptiningsih, N. A. (n.d.). Strategi Komunikasi Humas BAKTI Komdigi dalam Menanggulangi Pemberitaan Negatif: Pendekatan Media Monitoring Digital. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(2 SE-Articles), 321-336. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i2.7231>
- Zaxrie, S. A., Rina, N., Thoibah, S., Putri, K., & Sosial, M. (2024). *PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SALURAN KOMUNIKASI DIGITAL DALAM KEHUMASAN THE ROLE OF SOCIAL MEDIA AS A DIGITAL*. 3(1), 26-39.